

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA  
(DMIJ) TERINTEGRASI DI DESA PANGLIMA RAJA KECAMATAN  
CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Sri Anisha Medifiah**

*[smedifiah@gmail.com](mailto:smedifiah@gmail.com)*

**Dr. Mayarni, S.Sos., M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

***Abstract***

The Integrated Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Program is the flagship program of the Indragiri Hilir Regency Government. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Integrated Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) program and the inhibiting factors for the implementation of the Integrated Desa Advanced Inhil Jaya (DMIJ) program in Panglima Raja Village, Concong Subdistrict, Indragiri Hilir Regency. The results showed that the implementation of the Integrated Village Forward Inhil Jaya (DMIJ) Village in Panglima Raja Village, Concong District, Indragiri Hilir Regency that covers 4 (four) areas of activity have not been carried out properly, in the field of village administration and in the field of village development it can be said to be effective, because of development. which was implemented in 2019 has been carried out. While the field of community development, and the field of empowerment of village communities cannot be said to be effective, because the impact of the activities in the field of empowerment of the Integrated Village Forward Inhil Jaya (DMIJ) program has not been fully felt by the community, the program's contribution is still minimal. The obstacles to the implementation of the integrated DMJ program in the Panglima Raja Village are; limited means of transportation, poor road conditions, low human resource capacity, limited costs.

***Keywords: Effectiveness, Integrated Maju Inhil Jaya Village Program***

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan upaya kenaikan mutu hidup serta kehidupan buat sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk desa. Dalam pembangunan pedesaan, infrastruktur ialah salah satu faktor berarti dalam menunjang kemajuan desa. Keteringgalan pembangunan bermacam infrastruktur sangat mempengaruhi pada keterbatasan penduduk desa dalam berbicara, penciptaan serta mengakses data paling utama dalam mendukung kebutuhan penduduk desa.

Salah satu kendala dalam pembangunan pedesaan adalah ketertinggalan pembangunan infrastruktur yang mengakibatkan keterbatasan masyarakat dalam berkomunikasi, dan mengakses informasi meskipun pada saat sekarang sudah memasuki era modernisasi. Selain itu jalan merupakan sarana transportasi yang sangat vital jika dilihat dari segi fungsinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengeluarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat desa dan kelurahan melalui pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDesa, serta peningkatan kualitas keagamaan masyarakat melalui gerakan satu Desa dan Kelurahan Satu Rumah Tahfidz. Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi bukan hanya meliputi expositions pembangunan dan pemberdayaan ditingkat Desa namun juga pembangunan dan pemberdayaan ditingkat Kelurahan.

Saat observasi peneliti mendapatkan data tahun 2019 kegiatan pembangunan yang sudah terealisasi di desa khususnya Desa Panglima Raja Kecamatan Concong. Pembangunan yang sangat

menonjol di tahun 2019 yakni kegiatan pembangunan fisik yaitu infrastruktur.

Peneliti melakukan observasi di desa panglima raja melihat bahwa pembangunan fisik lebih diperioritaskan dibandingkan pembangunan pemberdayaan masyarakat sehingga pemanfaatan fasilitas baik sarana dan prasarana yang ada di desa tidak optimal, masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Desa Panglima Raja tergolong Desa yang masih harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dengan demikian hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi, kekuatan dan peluang dan permasalahan, kelemahan dan hambatan atau ancaman yang dihadapi desa. Komitmen pemerintah desa masih rendah karena dalam hal melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi 2019 terlihat dari pelaksanaan yang belum sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang ada.

Atas permasalahan yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Indragiri Hilir”**

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi Di

Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mencari apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, terkhususnya di bidang pembangunan dan dapat menjadi referensi bahan bacaan untuk peneliti selanjutnya.
2. Hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan pembangunan kedepannya guna menambah literatur dalam pembangunan persdesaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

## KONSEP TEORI

### 2.1 Administrasi Pembangunan

**Menurut The liang gie (2011:3)** mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

**Menurut Siagian (2009:4)** pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas

dalam rangkaian pembinaan bangsa (nation-building).

**Mostopadidjaya dalam affudin (2010:51)** menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien.

Peneliti menyimpulkan administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

### 2.2 Efektivitas

**Menurut Robbins dalam Tika, 2010** efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang.

Senada dengan hal tersebut **A.F Stoner dalam Nawawi, 2013** mengartikan efektivitas sebagai kemampuan menentukan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sementara itu menurut **Komaruddin dalam Mutiarin, 2014** efektivitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat dipahami bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi. Jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekatnya berorientasi pada pencapaian

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2.3 Pembangunan Desa

**Menurut Norman (2015:266-267)** pembangunan desa tidak akan terlepas dari suatu manajemen pembangunan daerah baik di tingkat Kabupaten ataupun tingkat Provinsi karena kedudukan desa tersebut konteksnya lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa dengan kecamatan, antara kecamatan dengan kabupaten.

### 2.4 Pelaksanaan

**Menurut G.R Terry** “Pelaksanaan adalah kegiatan meliputi menentukan, mengelompokan, mencapai tujuan, penugasan orang-orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Panglima Raja berdasarkan rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan serta ketentuan teknis menurut standar pembangunan.

### 2.5 Partisipasi Masyarakat

**Menurut Siti Irene (2011:50)** Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi Menurut Parwoto, partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. **(Siti Irene, 2011:56)**. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar, aktif, sukarela,

dan mandiri pada suatu program pemberdayaan atau pembangunan yang di mulai sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tahap pengawasan sampai dengan tindak lanjut program.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. **Menurut Jane Richie dalam Moleong 2007 dalam buku Fuad & Nugroho, 2014** penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi dan persoalan manusia yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti meliha tdimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang sedang terjadi dan juga untuk mencapai tujuan peneliti dalam penelitian ini.

Salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif adalah berupa pendekatan dengan metode atau tipe penelitian studi kasus (case study). **Menurut Berg 2001 dalam buku Yusuf, 2014** menegaskan bahwa metode studi kasus (case study) melibatkan pengumpulan informasi yang cukup sistematis tentang orang tertentu, latar sosial, peristiwa, atau kelompok untuk memungkinkan peneliti memahami secara efektif bagaimana ia beroperasi dari fungsinya.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga lokasi menunjang dalam memberikan informasi yang valid. Locus dalam penelitian ini adalah

pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong. dan yang menjadi penanggung jawab adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir. Peneliti melihat bahwa program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di Desa Panglima Raja sudah sepenuhnya berjalan dengan semestinya, diantaranya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah dibangun, seperti sumur bor, revitalisasi kantor desa, jembatan, rehab kantor, dan tanggul serta sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti efektifitas pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3.3 Informan Penelitian

Informan yang akan diwawancarai oleh peneliti terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kepala Bidang Pembangunan dan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3. Camat Kecamatan Concong
4. Lurah Concong Luar
5. Kepala Desa Panglima Raja
6. Masyarakat Desa Panglima Raja

### 3.4 Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. permasalahan yang diteliti . Data ini diperoleh melalui wawancara seacara langsung guna untuk mendapat jawaban yang relavan. Selain

melalui wawancara data ini diperoleh juga melalui pengamatan langsung (observasi) strage yang dilakukan terhadap objek penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk yang sudh berbentuk naskah tertulis atau dokumen, buku-buku, dan penelitian terdahulu (jurnal). Didalam penelitian ini digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat sebagai pendukung data primer antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi
5. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Terintegrasi
6. Buku Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi Tahun 2019

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis dalam rangka mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik :

#### 1. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti

mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses pengumpulan data, atau hanya menjadi non partisipan (pengamat).

## 2. Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg (dalam Sugiyono, 2016:232)** wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat dan idenya. Informasi yang didapatkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai efektivitas pelaksanaan Program Desa Mau Inhil Jaya Terintegrasi di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan observasi ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen membuat hasil dari wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel (**Sugiyono, 2016:240**). Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian. Data yang diambil melalui dokumentasi, yang

betujuan melengkapi data penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, data dapat berupa file, foto, dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) atau dokumen *private* (seperti buku harian)

## 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul maka teknik analisis data merupakan proses mencari dan juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, mjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (**Sugiyono, 2011**)

Menurun Bogdan dan Biklen (**Moleong, 2007**) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mmensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## HASIL PEMBAHASAN

### 5.1 Efektivitas Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

#### 5.1.1 Tepat Kebijakan

Tepat Kebijakan dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan atau melaksanakan suatu kebijakan

dapat dilihat dari bahasan yang akan dibahas dibawah ini. seperti ketepatan kebijakan yang melatarbelakangi program pemerintah dan apakah kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah atau tidak. Kebijakan dirumuskan sesuai dengan masalah, dan juga akan membahas dari sisi lembaga pembuat kebijakan yang merumuskan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang dilakukan peneliti, masalah yang ada di Desa Panglima Raja minimnya pembangunan yang bisa membantu dan mendorong kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Panglima Raja sangat rendah sekali. Jika dilihat dari akses jalan misalnya dan juga letak Desa Panglima Raja jauh dari ibu kota. Jalan-jalan desa antar dusun masih jalan setapak dengan berbahan kayu.

Keputusan yang diambil oleh Bupati Indragiri Hilir untuk membantu masyarakat miskin yaitu melalui pembangunan infrastruktur Program DMIJ Terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat yang artinya masyarakat dibebaskan untuk membangun infrastruktur apa yang sesuai dengan permasalahan di desa mereka dan tentunya sesuai dengan skala prioritas yang telah dibuat sebelumnya. Bupati tetap berada pada wewenangnya yaitu memiliki kebijakan program bantuan masyarakat yang bertumpu pada pembangunan fisik atau pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan atau program lainnya diharapkan dapat saling bersinergi dan mendukung untuk mengurangi masyarakat miskin di perdesaan.

### **5.1.2 Tepat Pelaksana**

Pelaksanaan Program DMIJ melibatkan berbagai unsur dan instansi terkait yang berjenjang dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten. Namun diharapkan peran pemerintah daerah selaku pembina pembangunan di wilayahnya lebih memberikan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan serta dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat dalam menyelenggarakan program dan mewujudkan harmonisasi program dan koordinasi antar tingkat atau jenjang pemerintah yang lebih optimal.

Suatu ketepatan pelaksanaan bukan hanya melibatkan sumberdaya manusia saja tetapi juga melibatkan sumber daya finansial berupa dana desa, implementor kebijakan dan desa dibagi atas pekerjaan dari masing-masing dibidang pembangunan.

Selain kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panglima Raja dengan pihak swasta, pemerintah desa juga melakukan kerja sama dengan masyarakat sehingga pada dasarnya pembangunan di desa Panglima Raja ini tidak hanya persetujuan dari pemerintah desa panglima raja saja. Sebelum pembangunan ini dilakukan pemerintah desa melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai perencanaan pembangunan.

Seperti yang telah di tulis diatas yang telah memaparkan bahwasanya ketepatan pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi dianggap tepat apabila pelaksanaan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dilangsungkan oleh pemerintah. Serta yang kedua yaitu pembangunan di bidang infrastruktur. Melihat tolak ukur tersebut, melalui penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan hasil yakni pelaksanaan pembangunan di Desa Panglima Raja telah sesuai dengan syarat ketepatan pelaksanaan tersebut. Sehingga dalam ketepatan pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi Di

Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dinilai tepat.

### **5.1.3 Tepat Sasaran**

Pada tahun 2019 Pemerintah Desa Panglima Raja menargetkan beberapa pembangunan yang harus terselesaikan. Berikut beberapa target menurut APBDesa pembangunan infrastruktur dan potensi desa di desa Panglima Raja pada tahun 2019 yaitu pembangunan jembatan, pembangunan rehab kantor desa, pembangunan tanggul tanah, pembangunan sumur bor, pembangunan bidang pemberdayaan dan pembangunan bidang pembinaan masyarakat.

Peneliti dilihat memang masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur yang berupa jalan yang bagus. Sebenarnya tidak hanya jalan yang bagus saja, namun pembangunan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan warga seperti sumber air yang bersih untuk memenuhi kehidupan warga desa ataupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan para petani kebun.

#### **A. Kesesuaian Sasaran Dengan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi**

Perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa Panglima Raja di jalankan oleh masyarakat, karena Program DMIJ Terintegrasi adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini aktor utamanya. Mulai dari perencanaan pembangunan sampai kepada pelaksanaan pembangunan bahkan tahap setelah pembangunan infrastruktur yaitu pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, karena perencanaannya masyarakat yang menyusun

dimaksudkan agar pembangunan yang dilakukan langsung mengenai pada sasaran yang desa tersebut tuju dan langsung dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut. Selain itu masyarakat juga menjadi pengurus dalam proses pelaksanaan program berlangsung, mulai dari ketua organisasinya sampai pada pengerjaan infrastrukturnya.

#### **1. Kelompok Sasaran Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi**

Pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur akan lebih di dahulukan dan di prioritaskan infrastruktur yang masyarakat miskin benar-benar butuhkan, bukan yang masyarakat inginkan, sehingga bangunan yang dibangun nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa setempat dan sehingga infrastruktur tersebut juga akan dipelihara dengan baik oleh masyarakat desa, karena apabila infrastruktur itu dimanfaatkan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat miskin maka bangunan itu akan di pelihara dengan baik agar bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Atau mungkin saja apabila pemberdayaan masyarakat juga masih berjalan dengan baik di desa itu, bangunan yang Program DMIJ berikan dapat berkembang dari adanya swadaya yang masyarakat berikan tak hanya pada pembangunan infrastruktur saja program DMIJ Terintegrasi lebih memfokuskan kepada pengembangan ekonomi dikawasan perdesaan.

#### **2. Manfaat Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi**

Manfaat dari Program DMIJ Terintegrasi sangat dirasakan oleh masyarakat di desa Panglima Raja. Hadirnya Program DMIJ Terintegrasi memang banyak dirasakan manfaatnya. Bukan hanya saja Program DMIJ

Terintegrasi yang hadir di desa Panglima Raja. Manfaat Program DMIJ Terintegrasi selain dirasakan oleh masyarakat desa juga dirasakan oleh fasilitator masyarakat sebagai elemen lainnya dan bagian dari rakyat Indonesia, dengan itu juga akan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya, jadi bukan hanya masyarakat desa saja yang merasakan manfaatnya,

### **3. Perubahan yang terjadi setelah adanya Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi di desa Panglima Raja**

Perubahan yang terjadi sejak adanya Program DMIJ Terintegrasi di desa Panglima Raja yaitu, tersedianya air bersih dengan dibangunnya sumur bor dilakukannya pembangunan sumur bor ini hanya mengantisipasi apabila air laut sedang surut. Sudah adanya akses darat masyarakat menuju desa lain nya dengan dibangunnya jembatan dan jalan beton untuk penghubung kedesa-desa. Sedangkan sebelum adanya DMIJ ini desa Panglima Raja sangat sulit untuk mendapatkan air bersih. Terlebih lagi jika air di laut sedang surut.

## **B. Intervensi Selama Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi**

Pelaksanaan program DMIJ Terintegrasi di desa dapat saja dipengaruhi oleh kebijakan lainnya dengan adanya hal tersebut memungkinkan timbulnya benturan-benturan kepentingan antar lembaga yang satu dengan yang lainnya. intervensi kebijakan mengenai pemilihan desa memang ada, berarti adanya intervensi tersebut dapat dikatakan sebagai intervensi dari kebijakan lainnya. Adanya intervensi dari kebijakan lain terhadap pelaksanaan program DMIJ Terintegrasi dapat juga memberi

implikasi terhadap berjalannya program ini.

Koordinasi yang dilakukan oleh kabupaten, dan kabupaten dengan kecamatan dan desa maka intervensi di tingkat kabupaten jarang sekali terjadi, pada desa panglima raja intervensi dari tingkatan kabuparen tidak terjadi sehingga koordinasi yang dilakukan antar tingkatatan pemerintah dilaksanakan dengan baik.

Dari penjelasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan efektivitas pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi Di Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari ketetapan sasaran maka dianggap tepat. Hal ini dibuktikan bahwa pembangunan di desa Panglima Raja telah sesuai dengan target yang sudah direncanakan, kedua adanya dukungan penuh dari warga desa panglima raja dan itu tidak ada konflik mapun selisih paham dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan pembangunan di desa Panglima Raja berjalan dengan lancar.

### **5.1.4 Tepat Lingkungan**

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada lingkungan internal yaitu apabila terjadi koordinasi yang baik antara lembaga terkait satu sama lainnya akan menunjang keefektifan pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi, begitu pula dengan lingkungan eksternal yang dalam konteks ini ialah masyarakat.

## **A. Lingkungan Internal Kebijakan**

Lingkungan internal kebijakan akan mempengaruhi pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi di masing-masing tingkatan pemerintah, dari mulai tingkat yang paling tinggi yaitu pihak kabupaten sampai ke pihak yang paling rendah yaitu kecamatan dan desa. Koordinasi yang dilakukan antara

tingkatan pemerintah yang dilakukan dalam program ini ialah berjenjang.

Koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi dilakukan secara berjenjang, sehingga interaksi antara lembaga terkait terlaksana secara teratur dan baik. Sehingga tidak ada terjadi tumpang tindih antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Interaksi secara baik. Interaksi dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait akan meminimalisir hal-hal menyimpang atau yang tidak sesuai dengan pedoman Program DMIJ Terintegrasi. Maka itu perlunya semua tingkatan pemerintah dalam pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi melakukan koordinasi dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling membantu dalam pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi khususnya di tingkat perdesaan.

## **B. Lingkungan Eksternal Kebijakan**

Lingkungan eksternal yang akan dibahas yaitu tertuju pada masyarakat, karena Program DMIJ Terintegrasi adalah program pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat disini akan menjadi aktor yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan Program DMIJ terintegrasi, masyarakat yang memiliki tanggapan baik terhadap program ini maka akan mengerjakan dan menjalankannya dengan baik dan tanggung jawab karena masyarakat itu mengerti akan tujuan dari Program DMIJ terintegrasi, sedangkan masyarakat yang memiliki tanggapan negatif terhadap Program DMIJ terintegrasi akan cenderung lebih kurang peduli terhadap pelaksanaan program Program DMIJ terintegrasi di desanya. Sehingga masyarakat yang disini termasuk dalam lingkungan eksternal kebijakan juga ikut mempengaruhi terhadap keefektifan Program DMIJ terintegrasi yang

berlangsung. Tanggapan publik terhadap Program DMIJ terintegrasi disini awalnya akan dibahas melalui pernyataan yang di lontarkan dari pihak pembuat kebijakan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak pusat mengetahui tanggapan publik dari adanya Program DMIJ terintegrasi.

Masyarakat desa panglima raja mempunyai anggapan yang positif terhadap hadirnya Program DMIJ Terintegrasi di desanya. Masyarakat desa panglima raja yang antusias terhadap adanya Program DMIJ Terintegrasi didesanya ini berimplikasi pada pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi di desa panglima raja yang walaupun memiliki hambatan dalam pelaksanaan tetapi Program DMIJ Terintegrasi didesa Panglima Raja tetap bisa terselesaikan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa Panglima Raja. Sehingga adanya pengaruh antara tanggapan publik yang positif akan sebuah program maka dalam melaksanakan program tersebut masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab dan akan lebih siap dalam menangani atau mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada saat pelaksanaan Program DMIJ Terintegrasi.

### **5.1.5. Tepat Proses**

#### **1. Penerima Kebijakan**

Tahap ketepatan proses ini, pada proses policy acceptance peneliti dapat melihat sejauh mana pemahaman pemerintah sebagai penggerak kebijakan program. Pelaksana yang dimaksud tersebut meliputi pemerintah di kabupaten, kecamatan bahkan pemerintah desa di Desa Panglima Raja.

Dari pemaparan diatas pelaksana kebijakan itu sendiri terdiri dari pemerintah kabupaten, kecamatan bahkan pemerintah desa dalam ketepatan proses pada tahap policy acceptance diketahui bahwasanya pelaksana

tersebut sudah memahaminya kebijakan desa.

## 2. Adaptasi Kebijakan

Langkah kedua untuk melihat ketepatan proses yaitu tahap policy adaption. Langkah ini berbeda dengan yang tadi. Jika langkah pertama itu pemerintah harus memahami kebijakan serta harus melaksanakannya, maka langkah ini pemerintah harus menerima sebuah kebijakan dan harus melaksanakan. Menerima yang dimaksud ini mengarah pada bagaimana dana desa di terima dan juga harus dilaksakana sebagai pembangunan di Desa Panglima Raja. Didesa Panglima Raja ini telah menerima dana desa dari program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi dengan jumlah besaran yang telah sesuai. Pada tahun 2019 Desa Panglima Raja menerima dana desa sebesar Rp.878.423.141.133. Dengan dana yang sudah diterima tersebut maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan.

## 3. Kesiapan Strategi

Penelitian yang dilakukan peneliti ini untuk melihat startegic readiness pelaksanaan pembangunan di Desa Panglima Raja telah membuktikan bahwa pemerintah serta masyarakat sudah menjadi dari bagian kebijakan tentang pelaksanaan program. Pemerintah desa sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga saat ini masyarakat Desa Panglima Raja telah mendapatkan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga masyarakat sudah mudah dalam mengaksesnya. Serta adanya penyuluhan-penyuluhan yang di terapkan oleh masyarakat.

Berbagai pemaparan serta informasi yang diperoleh dari peneliti dalam penelitian ini, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa ketepatan proses dalam kebijakan pelaksanaan program

dinilai tepat. Dibuktikan dari adanya suatu pemahaman serta penerimaan dana desa oleh pemerintah. Selain itu juga adanya pelaksanaan yang sesuai dengan pemahaman serta penerimaan tersebut. Selain masyarakat Panglima Raja sudah menjadi bagian dari kebijakan tetapi ia juga sebagai pelaksana serta penikmat dari pembangunan-pembangunan yang sudah ada itu.

## 5.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi Di Desa Panglima Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

### 5.2.1 Keterbatasan Alat Transportasi

Desa panglima raja yang terletak di daerah pesisir sungai indragiri kecamatan concong kabupaten Indragiri hilir jauh dari ibu kota kabupaten, sehingga mempunyai keterbatasan alat transportasi dalam pelaksanaan program desa maju inhil jaya terintegrasi di desa panglima raja ini, transportasi yang di gunakan untuk membawa barang dan material adalah kapal.

Melihat kendala dan keterbatasan ini pemerintah desa hanya bisa menunggu barang dan material dari pusat kota dengan waktu yang cukup lama oleh karena itu pelaksanaan program didesa panglima raja terhambat akibat dari keterbatasan transportasi laut.

### 5.2.2 Kondisi Jalan Yang Kurang Baik

Infrastruktur dasar memuat informasi tentang kondisi dan perkembangan infrastruktur dasar atau utama untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi wilayah desa pesisir. Infrastruktur dasar secara umum terdiri atas listrik, air bersih, jalan, drainase, telekomunikasi, sanitasi, puskesmas, sekolah, sarana peribadatan.

Peneliti melihat jalan merupakan salah satu faktor utama

dalam pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan lancar atau tidak. Melihat kondisi jalan yang tidak bagus dari masing-masing dusun yang ada di desa Panglima Raja memungkinkan terhambatnya pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi.

### **5.3.3 Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Masyarakat**

Peneliti melihat rendahnya kapasitas masyarakat di desa panglima raja kecamatan concong ini ditandai dengan ketidak adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program desa maju inhil jaya di kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di desa panglima raja di era zaman modernisasi ini.

### **5.3.4 Keterbatasan Anggaran**

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa yang menjadi kendala utama dalam program pemerintah adalah keterbatasan anggaran, namun hal diatas dana yang dikucurkan oleh program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Terintegrasi untuk Desa Panglima Raja masih minim terlihat dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan pencairan yang sering mengalami keterlambatan sehingga rencana kegiatan pembangunan didesa panglima raja tertunda dan harus dianggarkan untuk tahun berikutnya.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di desa Panglima Raja Kecamatan Concong belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) indikator keefektivan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.

Jika dilihat dari segi pemberdayaan masyarakat, desa panglima raja jauh dari keberhasilan desa yang maju, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Program desa maju inhil jaya terintegrasi didesa panglima raja berdampak positif pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembangunan desa. yakni adanya alokasi penguatan dana operasional pemerintah desa dan insentif aparat penyelenggaraan pemerintah desa, dan pembangunan desa juga memadai dalam pembangunan Infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Pada, bidang pembinaan kemasyarakata desa juga dapat dikatakan baik. Namun pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, hasil yang diinginkan belum tercapai secara baik atau kurang maksimal.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi di desa Panglima Raja Kecamatan Concong kabupaten Indragiri hilir, adapun saran atau rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi efektivitas pelaksanaan program Desa Maju Inhil Jaya Terintegrasi dalam membangun desa adalah:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diperlukan pengaturan mengenai kinerja aparat desa tentang tugas pokok dan fungsi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta lebih memperhatikan mekanisme pengelolaan keuangan desa, guna meminimalisir adanya kesalahan dan penyelewengan anggaran
2. Untuk pemerintah desa, penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan sebaiknya tidak hanya

digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal besar. Alangkah baiknya juga harus memperhatikan pembangunan ekonomi seperti adanya pembuatan lahan usaha untuk masyarakat desa Panglima Raja dengan tujuan untuk meningkatkan SDM yang ada serta dapat mengurangi adanya tingkat pengangguran yang ada di Desa Panglima Raja.

3. Kepada perangkat desa dalam hal pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada, dinilai masih kurang. Dan masih terdapat kekurangan pada fasilitas kegiatan pendidikan dan magrib mengaji. Sehingga dibutuhkan peranan pihak pemerintah desa kecamatan atau kabupaten dalam mengontrol secara berkala pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

Adistina, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Gaha Ilmu.

Almasri, Muammar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah diIndonesia*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Ambar Teguh Sulistiani, 2004. *Kemitraan dan model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.

Annivelorita., 2015, *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan*, Journal Administrasi

Budiman, A. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Desma Elita, 2019 (Skripsi), *Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*

Edi Suharto, 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama

Edi Suharto, 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT.Refika Aditama

Faisal, Sanapiah, 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hanif Nurcholois, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga

Kaho, Josef Riwu, 2007. *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalannya Otonomi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo.

Keiffer, C. H., 1984. *Citizen Empowerment : A Development*. London : Mac Milan Kuswata, R. Agustoha, 1985. *Manajemen Pembangunan Desa*. Jakarta : GrafindoUtama.

Linconlin Arsyad dkk, 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*, Yogyakarta: STIM YKPN

Muhammad Arif, Suci Shinta Lestari, 2018 (Jurnal), *Analisis Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) Studi*

*Kasus Pada Program Desa Maju  
Inhil Jaya Di Kabupaten Indragiri Hilir*

Ndraha Talidziduhu, 1987.  
*Pembangunan Masyarakat.*  
Jakarta : Bumi Aksara

Oky Aditya Pranata, 2017 (Jurnal),  
*Faktor-Faktor Yang  
Mempengaruhi Pengelolaan  
Alokasi Dana Anggaran Program  
Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di  
Desa Kembang Mekar Sari  
Kecamatan Keritang Kabupaten  
Indragiri Hilir*

Riant Nugroho. (2012). *Public Policy.*  
Jakarta: PT. Gramedia

Steers, M. Richard, 1985, *Efektivitas  
Organisasi*, Jakarta, Erlangga

Suharto, Edi, 2005. *Membangun  
Masyarakat Memberdayakan Rakyat:  
Sebuah*  
Bandung : Refika Aditama.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian,*  
Bandung: Alfabeta CV.

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato.  
2015. *Pemberdayaan Masyarakat,*  
Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
*Tentang Desa*

Peraturan Daerah (PERDA) Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah  
Daerah (RPJMD) Kabupaten  
Indragiri Hilir 2018-2023

Peraturan Bupati Indragiti Hilir No. 3  
Tahun 2019 *Tentang Desa Maju  
Inhil Jaya (DMIJ) Teintegrasi*

Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 12  
Tahun 2020 *Tentang Petunjuk  
Teknis Operasional Program Desa  
Maju Indragiri Hilir Jaya  
Terintegrasi*

Wibawa, Samodra, *Administrasi  
Negara Isu-Isu Kontemporer,*  
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Widjaja, *Otonomi Desa,* Jakarta: PT.  
RajaGrafindo Persada, 2004.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik  
Teori Proses dan Studi Kasus,*  
Jakarta: PT. Buku Seru, 2012

